

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA RETRIBUSI
IZIN TRAYEK DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : NUR HANDAYANI

NIM : 22 2008 053

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2012**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TURUNNYA RETRIBUSI
IZIN TRAYEK DAN UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



OLEH :

NAMA : NUR HANDAYANI

NIM : 22 2008 053

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI**

2012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR HANDAYANI

NIM : 22 2008 283

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahawa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya akan sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dan segala konsekuensinya.

Palembang, 17 Februari 2012

Penulis


Nur Handayani

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB
TURUNNYA RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN
UPAYA-UPAYA UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS
PERHUBUNGAN KOTA PALEMBANG**

Nama : Nur Handayani
NIM : 22 2008 053
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

**Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal , 2012**

Pembimbing



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN:0206046303

**Mengetahui
Dekan
U.b Ketua Program Studi Akuntansi**



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN:0206046303

Motto

- *Setetes peluh Ibuku menjadi secerah perjuanganku*
- *Lurang yang curah bukanlah hambatan untuk melangkah*
- *Kejujuran adalah jiwa yang lebih bercahaya daripada bersian*
- *Tidak ada yang tidak mungkin dapat kita raih bisa kita berusaha dan berdo'a kepada-Nya atas apa yang kita usahakan*

(Handayani)

Terucap syukur ku Persembahkan Kepada-Mu ya Allah....

Kupersembahkan kepada:

- *Orang tuaku tercinta*
- *Saudara-saudaraku tercinta*
- *Some one special in my heart*
- *Pembimbingku*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Amanater tercinta*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Alhamdulillahirrobbil A'lamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun.

Realisasi Penerimaan Izin Trayek setiap tahunnya mengalami fluktuasi target yang dianggarkan. Hal ini menggambarkan belum optimalnya pencapaian penerimaan retribusi izin trayek terhadap penerimaan retribusi daerah. Bila dilihat dari banyaknya kendaraan yang ada di Kota Palembang selalu meningkat dan penerimaan retribusi setiap tahunnya tidak mencapai target yang di anggarakan. Dengan adanya permasalahan ini penulis melakukan penelitian yang berjudul "Analisis faktor-faktor penyebab turunnya retribusi izin trayek dan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada dinas perhubungan Kota Palembang".

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku (H.Slamet Yahya dan Hj. Aliyah) yang telah mendo'akan, membiayai, mendidik, dan memberi dorongan semangat dan motivasi kepada penulis. Suamiku yang telah memberikan do'a, dorongan semangat, dan membantu membiayai penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si

yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu juga penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Taufiq Syamsudin, S.E., Ak. M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Drs. Sunardi, S.E, M.Si dan Ibu Welly, S.E M.Si selaku Ketua dan Staf Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Pimpinan beserta Staf dan Karyawan/Karyawati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Pimpinan Dinas Perhubungan Kota Palembang yang telah memberikan informasi dan data yang saya butuhkan
6. Ayahku (H. Slamet Yahya) dan ibuku (Hj. Aliyah) yang teramat aku sayang dan cintai yang selalu memberikanku do'a dan semangat serta memberikan kasih sayang.
7. Teman-teman seperjuangan angkatan 2008, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini.
8. Teman-teman KKN tahun 2011 terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik kalian semua. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarohkatuh

Palembang, Februari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SEKRIPI SI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PRAKARTA	v
HALAMAN DAFTAR ISI.....	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan teori	9
1. Retribusi Daerah.....	9
a. Pengertian Retribusi Daerah.....	9

b. Objek dan subjek Retribusi Daerah.....	10
2. Retribusi Izin trayek.....	11
a. Pengertian Izin Trayek	11
b. Tarif Retribusi Izin Trayek.....	13
c. Masa Retribusi dan saat Retribusi terhutang	14
d. Tata cara Pembayaran	14
e. Tata cara Pemungutan	15
f. Tata cara Penagihan	15
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Retribusi Izin Trayek menuru	15
4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah	16

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	18
B. Tempat Penelitian.....	19
C. Operasional Variabel.....	19
D. Data yang diperlukan	21
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	22

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang	24

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang	25
3. Tujuan, sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi dinas Perhubungan Kota Palembang	25
4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas	27
B. Pembahasan Hasil penelitian	45

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	58
B. SARAN	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penerimaan Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2006-2010	4
Tabel I.2	Data Kendaraan Penumpang Umum/Bus menurut jenisnya 2006-2010.....	4
Tabel I.3	Target dan Realisasi Retribusi Daerah 2006-2010.	5
Tabel II.1	Tarif Retribusi Izin Trayek berdasarkan Golongan 2006-2010	6
Tabel III.1	Operasional Variabel	20
Tabel IV.1	Data Penerimaan Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Kota Palembang Tahun 2006-2010	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.I	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang.....	29
-------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Kartu Aktivitas bimbingan sertifikat
- Lampiran II Surat selesai melakukan riset
- Lampiran III Sertifikat mengaji
- Lampiran IV Sertifikat Toefel
- Lampiran V Biodata Penulis

ABSTRAK

Nur Handayani /22 2008 053/ 2012 / Analisis Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Retribusi Izin Trayek Dan Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang / Akuntansi Sektor Publik.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan penerimaan Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang Menurun dan untuk mengetahui upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin trayek.

Penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif, Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan metode kualitatif, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyajikan angka, tabel, dan uraian penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi izin trayek menurun dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan retribusi daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan retribusi izin trayek menurun yaitu, 1) penentuan target belum realistis, 2) Tingkat efektivitas pemberlakuan sanksi, 3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan dilapangan kurang tegas, dan 4) Sarana dan Prasarana untuk operasional lapangan. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan retribusi izin trayek adalah 1) Kemampuan sumber daya yang harus ditingkatkan, 2) koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan, 3) kualitas pelayanan harus diperbaiki, 4) Pendekatan objek dan subjek pajak/retribusi, 5) Pembuatan peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Kata Kunci : Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek.



ABSTRACT

Nur Handayani / 22 2008 053 / 2012 / Analysis of Factors Contributing to fall in Route Permits And Efforts To Increase Revenue Department of Transportation Levies on Palembang / Accounting Public Sector.

Research formulation of the problem in this is what factors are causing the route permit fee revenues in Palembang City Department of Transportation declined and what efforts are made by the Government in order to improve the route permit fee revenue. The goal is to determine the factors that led to acceptance of Route Permits for the Transport Department and the city of Palembang Declining to know that efforts will be made by the Government of Palembang in increasing revenue Permits route.

This study uses a descriptive study, data used in this study is the primary data, data collection techniques used in writing this Final documentation. Method interview techniques and qualitative methods of analysis used, the analytical techniques used in this study with the present figures, tables, and description description of the factors that influence the route permit fee revenue declined and efforts are being made to increase the revenue target retribution.

The analysis shows that the factors that led to the route permit fees menurn ie, 1) the determination has not been a realistic target, 2) The effectiveness of sanctions, 3) System Control and Supervision of the field is less clear, and 4) Infrastructure for field operations. And the efforts made by governments in order to increase acceptance of route permit fees are 1) the ability of the resources should be increased, 2) coordination among employees and related institutions were developed, 3) quality of service should be improved, 4) Approach the object and subject of the tax / levy, 5) Making regulations more in line with the development of the situation.

Keywords: The Local Retribution, Retribution Route Permits.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah suatu upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi Nomor 33 Tahun 2004, menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah.

Mengingat pendapatan daerah merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah tentunya pendapatan daerah perlu diperhatikan dalam pencapaian penerimaannya. Diantara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, Retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah (PAD) ikut memberi kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggungjawab.

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara profesional dan

bertanggungjawab karena wewenang pemungutan, pengelolaan, dan penggunaan dana retribusi sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari penerimaan pajak, Bagian Laba BUMN, dan Retribusi daerah.

Retribusi Izin Trayek merupakan suatu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, peraturan, pengawasan, atas kegiatan lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Penurunan retribusi yang terjadi pada retribusi izin trayek salah satunya disebabkan oleh faktor tarifnya yang terlalu tinggi yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan dan lemahnya aparat pajak atau retribusi dalam menarik retribusi kepada masyarakat sehingga terjadi penerimaan retribusi turun. Dan upaya-upaya yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah maka pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat mengkoordinasi antar karyawan dan pihak instansi yang terkait untuk dikembangkan dan kualitas pelayanannya pun harus diperbaiki dan ditingkatkan.

Dinas Perhubungan Kota Palembang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan retribusi izin trayek. Dinas perhubungan merupakan dinas yang mengelola izin trayek dan berusaha untuk meningkatkan penetapan agar target yang diinginkan dapat tercapai. Dinas perhubungan Kota Palembang memastikan bahwa

retribusi yang dipungut masuk ke kas daerah sehingga segala bentuk penyelewengan, penyimpangan, dan penyalahgunaan dapat di hilangkan.

Dinas perhubungan Kota Palembang mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas, angkutan jalan, serta tugas yang lain diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tugas tersebut Dinas Perhubungan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
2. Melaksanakan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan menteri Perhubungan Kota Palembang.
3. Melaksanakan pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota Palembang.

Berikut ini adalah daftar persentase perkembangan target dan realisasi Retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Tabel I.1
Data Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Dinas Perhubungan Kota Palembang
Tahun 2006 – 2010

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek
2006	1.000.000.000	1.366.580.000	136,66 %
2007	1.200.000.000	1.519.275.000	126,61%
2008	2.177.125.000	2.547.155.200	177,00%
2009	2.750.000.000	2.346.610.000	85,33 %
2010	2.887.500.000	2.530.665.000	87,64 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2011

Tabel I.2
Data Kendaraan Penumpang Umum / Bus Menurut Jenisnya
Tahun 2006 – 2010

Jenis Kendaraan	2006	2007	2008	2009	2010
Mobil Penumpang Umum	222	222	262	262	262
Mobil Bus Umum	440	440	483	483	483
Mobil Barang Umum	415	415	415	515	515
Mobil Barang Bukan Umum	1458	1574	1574	1574	1728
Kendaraan Khusus	79	79	79	112	122
Jumlah	2614	2730	2813	2946	3100

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2011

Berdasarkan dari Tabel I.1 dan I.2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 -2010 persentase realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek terhadap Retribusi Daerah fluktuatif dan tidak mencapai target yang di anggarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang, sedangkan jumlah kendaraan umum/bus selalu mengalami perubahan/naik. Jadi terlihat suatu kontradiksi dimana penerimaan retribusi izin trayek menurun sedangkan jumlah kendaraan selalu meningkat.



Tabel berikut ini merupakan gambaran target dan realisasi penerimaan Retribusi Dinnas Pendapatan Daerah Kota Palembang Tahun 2006-2007.

Tabel I.3
Target dan Realisasi Retribusi Daerah
Tahun 2006 – 2010

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentas
2006	Rp. 61.041.972.527	Rp. 40.375.914.272	66,14%
2007	Rp. 55.999.049.227	Rp. 48.572.128.218	86,73%
2008	Rp. 63.332.753.137	Rp.59.055.021.400	93,24%
2009	Rp. 64.629.000.000	Rp. 51.274.328.286	79,33%
2010	Rp. 74.393.402.273	Rp. 65.175.505.023	87,60%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, 2011

Berdasarkan Tabel I.3 tersebut, dapat dilihat bahwa persentase realisasi penerimaan retribusi daerah selama tahun 2006-2007 selalu tidak tercapai anggaran dan realisasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Retribusi Izin Trayek Dan Upaya-Upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor–faktor apa saja yang menyebabkan penerimaan Retribusi Izin Trayek di Dinas perhubungan Kota Palembang menurun ?
2. Upaya–upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan Penerimaan Retribusi Izin Trayek ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor–faktor yang menyebabkan penerimaan Retribusi Izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun.
2. Untuk mengetahui upaya- upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Trayek.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai penerimaan Retribusi Izin Trayek terhadap penerimaan Retribusi Dinas Perhubungan Kota Palembang.

2. Bagi Pemerintah kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk bahan evaluasi dan peningkatan penerimaan retribusi izin trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka dan ilmu pengetahuan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Retribusi Izin Trayek.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk yang dilakukan oleh Oktarina (2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah hambatan apa yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk agar penerimaan retribusi pelayanan pasar meningkat.

Terdapat dua variabel yang digunakan yaitu hambatan tidak tercapainya penerimaan retribusi pelayanan pasar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang menyebabkan tercapainya penerimaan pelayanan pasar pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Induk adalah faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya yang dilakukan yaitu upaya eksternal.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sedangkan penelitian sekarang meneliti tentang Analisis Faktor-faktor Penyebab Turunnya Retribusi Izin Trayek dan Upaya-upaya untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. Persamaan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan penulis sekarang adalah sama-sama meneliti faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya penerimaan retribusi.

B. Landasan Teori

1. Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Bastian dan Gatot Soepriyanto (2003:90) menyatakan bahwa Retribusi Daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

- 1) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

- 2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- 3) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah yang bersangkutan.

b) Objek dan Subjek Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 Tahun 2001 (2001:92-94) disebutkan objek retribusi terdiri dari :

- 1) Objek Retribusi jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau yang diberikan Pemerintah Daerah untuk Kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi Jasa Usaha adalah jasa usahayang disediakan oleh pemerintah daerah menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Retribusi Izin Trayek

a) Pengertian Izin Trayek

Izin Trayek merupakan izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan usaha angkutan umum dengan trayek tetap dan diatur. Salah satu unsur dalam meningkatkan jumlah pendapatan daerah guna mendukung pembangunan yang akan terjadi dimasa yang akan datang dan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini.

Beberapa pengertian yang berkaitan dengan Retribusi Izin Trayek menurut peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 tahun 2011 Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum maupun angkutan barang pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang No.15 Tahun 2011 pasal 1 yang berkaitan dengan Retribusi Izin trayek adalah sebagai berikut :

- (1) Angkutan Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
- (2) Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- (3) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi
- (4) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- (5) Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
- (6) Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argrometer dan wilayah operasi terbatas.

- (7) Angkutan Barang khusus adalah jenis barang yang di angkut karena sifat dan ukurannya memerlukan penanganan khusus misalnya : kayu logs, barang curah, batang rel, ternak, ikan beku, dan sebagainya.
- (8) Objek Retribusi adalah Pemberian izin trayek untuk menyediakan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam wilayah tertentu.
- (9) Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang mendapat izin trayek.

b) Tarif Retribusi Izin Trayek

Menurut undang-undang No. 25 tahun 2001 tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhitung.

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut. Besarnya tarif izin trayek ditetapkan di Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Tarif Retribusi Izin Trayek Berdasarkan Golongan
Tahun 2006 – 2010

Jenis Angkutan	Kapasitas tempat Duduk / Orang	Tarif
1. Mobil Penumpang	s/d 8 orang	Rp 875.000 / Thn
2. Mobil Bus	9 s/d 15 orang	Rp 1.000.000 / Thn
	16 s/d 25 orang	Rp 1.125.000 / Thn
	Lebih dari 26 orang	Rp 1.250.000 / Thn
Angkutan Khusus :		
1. Angkutan Barang		
a. Truk		Rp 1.250.000 / 5 Thn
b. Pik up dan sejenis		Rp 875.000 / 5 Thn
2. Angkutan Orang		
a. Sewa		Rp 750.000 / 5 Thn
3. Angkutan		
a. Dalam Kota		Rp 3000 / 1X pp
b. Luar Kota		Rp 5000 / 1X pp

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2011

c) Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota yang bersangkutan. Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang ditetapkan.

d) Tata Cara Pembayaran

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar



Tambahan (SKRDKBT) dan surat tagihan retribusi Daerah (STRD). Tata cara pembayarannya, penyetorannya, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

e) Tata Cara Pemungutan

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

f) Tata cara penagihan

Pengeluaran surat teguran/ penagihan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi setelah 7 hari setelah jatuh tempo, dalam jangka waktu 7 hari setelah surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Izin

Trayek Menurun

Menurut Harist (2000:8) ada tiga faktor utama penyebab tidak keefisienan pemungutan pajak atau retribusi di Indonesia adalah :

- 1) Tarifnya yang terlalu tinggi
- 2) Lemahnya aparat pajak atau retribusi
- 3) Rendahnya tingkat kepatuhan membayar

Sedangkan menurut Kuncoro (2000:414) penyebab utama rendahnya pendapatan Asli Daerah (PAD) yang gilirannya menyebabkan ketergantungan terhadap subsidi pemerintah pusat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kurang berperannya perusahaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- 2) Kendali pajak daerah dan retribusi daerah sangat beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan.
- 3) Kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah.

4. Upaya-upaya yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah

Menurut Kunarjo (2004:178) untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Dalam pendekatan intensifikasi yang harus dilakukan adalah :

- a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c. Kualitas pelayanan harus diperbaiki.

Sedangkan usaha ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Pendekatan objek dan subjek pajak/retribusi
- b. Penggalian sumber-sumber baru
- c. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:11) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasinya ada tiga macam yaitu :

1. Penelitian Deskriptif

Ialah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai yang variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian komparatif

Ialah penelitian yang bersifat membandingkan, disini variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi tetap untuk sampel lebih dari atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Assosiatif (Hubungan)

Ialah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan olehm penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan penerimaan retribusi izin trayek menurun dan upaya untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhunungan Kota Palembang yang beralamat di jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau mensepesifikasiakan bagaimana variabel atau kegiatan tersebut diukur. Adapun variabel dan indikator yang akan diuraikan penulis adalah sebagai berikut:



Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
a. Tarifnya terlalu tinggi	Adanya suatu faktor penyebab tidak keefisienan pemungutan pajak atau retribusi.	a. Penentuan target belum realistis
b. Lemahnya aparat pajak		b. Tingkat efektivitas pemberlakuan sanksi
c. Rendahnya tingkat kepatuhan membayar		a. Sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan kurang tegas
Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perhunungan Kota Palembang	Untuk mengatasi rendahnya target penerimaan retribusi daerah pada umumnya pemerintah dapat menggunakan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi.	a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan c. Kualitas pelayanan harus diperbaiki d. Pendekatan objek dan subjek pajak/retribusi e. Pembuatan peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Sumber : Penulis, 2011

D. Data yang Diperlukan

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang (2002:147) dilihat dari cara memperolehnya data terdiri dari :

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data sekunder

Adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data primer adalah sebagai berikut :

- a) Gambaran umum Dinas Perhubungan
- b) Peraturan Kota Palembang tentang retribusi izin trayek
- c) Daftar penerimaan target dan realisasi tahun 2006 – 2010
- d) Data kendaraan penumpang umum / Bus menurut jenisnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nur Indiantoro dan Bambang (2002:158) Teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Wawancara

Adalah pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan responden.

2. Survey

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

3. Observasi (Pengamatan)

Adalah metode pengumpulan data dengan mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.

4. Kuisisioner (Angket)

Adalah pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada responden untuk diisi.

5. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan cara melakukan penyidikan melalui sumber dokumen, baik yang terjadi dimasa lalu maupun masa sekarang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan karyawan atau instansi yang berwenang untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan data retribusi izin trayek dan dengan cara dokumentasi, yaitu penulis menggunakan data yang tersedia pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

F. Analisis Data dan Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2004:14) analisis data terdiri dari :

1. Analisis Kualitatif

Yaitu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

2. Analisis Kuantitatif

Yaitu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkatkan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah analisis dengan cara menyajikan angka, tabel, dan menguraikan serta menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi izin trayek, dan upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan target penerimaan retribusi di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah singkat Dinas Perhubungan Kota Palembang

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta merta di ikuti perubahan instansional, melainkan tahap-tahap instansional yaitu berawal dari terbentuknya dinas LLAJ Palembang I berubah menjadi Dinas LLAJR Wilayah I, berubah lagi menjadi cabang dinas I LLAJR Tingkat II Kodya Palembang.

Untuk teknis administrasi, setelah dikeluarkannya peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi dinas daerah, bahwa dinas daerah yang ada di Kota Palembang terdiri dari sembilan belas jenis, salah satunya adalah dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang perhubungan, yang dipimpin oleh kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Palembang.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan izin trayek. Kepala daerah melalui dinas perhubungan melakukan pembinaan, meliputi pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

2. Visi Dan Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

Visi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan perhubungan yang berkualitas dalam rangka menuju Palembang Kota Internasional
- b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia yang kreatif dan proaktif untuk mengantisipasi perkembangan IPTEK.
- c. Meningkatkan pembangunan dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan serta mengembangkan manajemen keselamatan perhubungan.

Misi Dinas Perhubungan Kota Palembang

- a. Meningkatkan pelayanan jasa perhubungan yang lebih berkualitas
- b. Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyedia dan pengguna jasa perhubungan di Kota Palembang.

3. Tujuan, Sasaran, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Palembang

- a. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Palembang
 - 1) Meningkatkan kualitas aparat perhubungan dan disiplin masyarakat dalam rangka menciptakan lalu lintas yang tertib dan nyaman, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - 2) Terwujudnya sistem jaringan transportasi komunikasi dan informasi efektif guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi dalam menunjang pelayanan masyarakat.

b. Sasaran Dinas Perhubungan Kota Palembang

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah :

- 1) Terwujudnya transportasi darat sesuai kebutuhan masyarakat
- 2) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara akuntabel

c. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan
- 2) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang perhubungan
- 3) Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas perhubungan pembinaan unit pelaksanaan teknis dinas perhubungan dan cabang dinas perhubungan.

d. Fungsi Pokok Dinas Perhubungan Kota Palembang

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dibidang perhubungan yang sifatnya mendukung secara operasional kebijakan pemerintah Kota Palembang.
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Melaksanakan pembinaan UPTD (unit pelaksana Teknis Dinas)
- 4) Memberikan sarana-sarana dan pertimbangan kepada walikota tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya perhubungan.

4. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a. Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu organisasi tergantung kepada struktur dan efektifitas kinerja anggota organisasi tersebut. Struktur organisasi adalah susunan atau gambaran yang menunjukkan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing fungsi dan personalianya. Struktur organisasi akan memperlihatkan hubungan pada bidang mana tugas harus dilaksanakan serta kemana pelaporan harus disampaikan agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

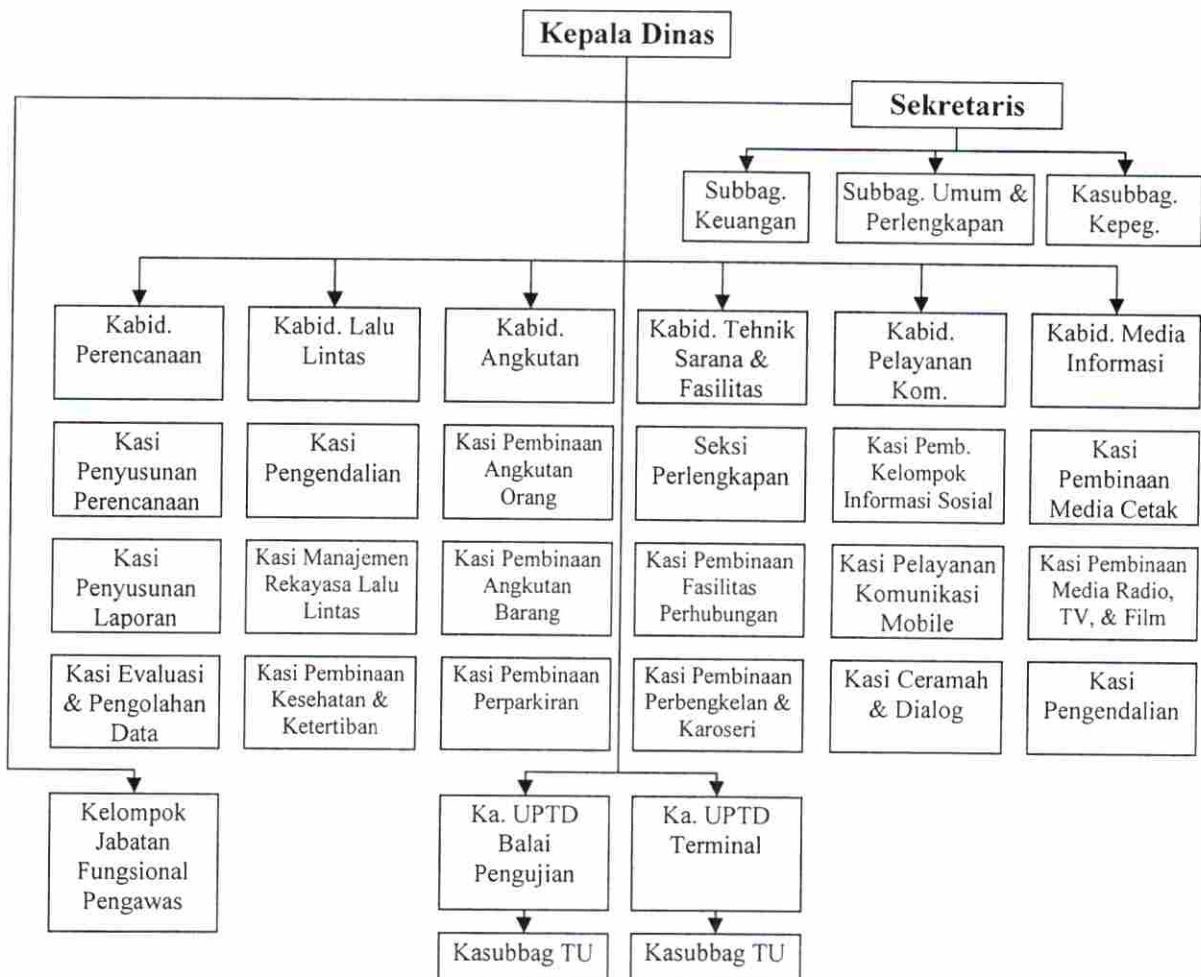
Struktur organisasi pada dinas perhubungan berbentuk garis, karena wewenang akan mengalir secara langsung dari Kepala Dinas kemudian ke kepala sub bagian dan kemudian terus ke pegawai-pegawai dibawahnya. Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris :
 - (a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan

- (b) Sub Bagian Keuangan
 - (c) Sub Bagian Kepegawaian
- 3) Bidang perencanaan :
- (a) Seksi Penyusun Perencanaan program
 - (b) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - (c) Seksi Evaluasi dan Pengelolaan Data
- 4) Bidang Lalu Lintas :
- (a) Seksi Pengendalian Operasional
 - (b) Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
 - (c) Seksi Pembinaan keselamatan dan Ketertiban Lalu Lintas
- 5) Bidang Angkutan :
- (a) Seksi Pembinaan Angkutan orang
 - (b) Seksi Pembinaan Angkutan Barang
 - (c) Seksi Pembinaan perpakiran
- 6) Bidang teknik Sarana dan Fasilitas Perhubungan :
- (a) Seksi perlengkapan jalan dan jembatan
 - (b) Seksi pembinaan fasilitas perhubungan
 - (c) Seksi pembinaan perbengkelan dan koreseri
- 7) Bidang Pelayanan Komunikasi :
- (a) Seksi pembinaan kelompok informasi sosial
 - (b) Seksi pelayanan komunikasi mobile
 - (c) Seksi ceramah dan dialog

- 8) Bidang Media Informasi :
- (a) Seksi media cetak
 - (b) Seksi pembinaan radio, TV, dan Film
 - (c) Seksi pengendalian Informasi dan Pameran
- 9) UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor :
- (a) Sub Bagian Tata Usaha
- 10) UPTD Terminal :
- (a) Sub Bagian Tata Usaha.

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang

b. Pembagian tugas

Berdasarkan struktur organisasi yang ada, maka pembagian tugas dan fungsi organisasi Dinas Perhubungan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lalu lintas yang diberikan pemerintah kota Palembang antara lain :

- a) Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhubungan dengan kebijakan yang digariskan oleh kepala daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk pelaksanaannya.
- b) Merumuskan kebijaksanaan operasional pembangunan daerah dibidang pasar
- c) Mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan unsur-unsur pemerintah daerah dan instansi serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas pokok.
- d) Memberikansaran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2) Wakil dinas

Membantu tugas-tugas kepala dinas membuat program kerja dinas perhubungan jangka pendek, menengah, jangka panjang,

memberikan saran/pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya. Wakil kepala dinas mempunyai fungsi :

- a) Membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - b) Memberikan saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
 - c) Menjalankan tugas dan fungsi kepala dinas sehari-hari apabila kepala dinas berhalangan atau berada diluar daerah berdasarkan surat petunjuk kepala daerah.
- 3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan verifikasi pengeluaran anggaran
 - b) Membantu laporan realisasi pengeluaran anggaran
 - c) Membuat laporan realisasi penerimaan retribusi
 - d) Membuat dan menghimpun data pengeluaran keuangan
 - e) Membuat dan menghimpun data penerimaan retribusi
 - f) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
 - g) Menghimpun data dan pertanggungjawaban keuangan.
- 4) Sub bagian umum dan perlengkapan
- a) Mengagendakan semua surat masuk dan keluar
 - b) Memfasilitasi semua tamu yang akan menghadap kepala dinas

- c) Mengatur petugas piket kantor dan mendistribusikan surat-surat masuk
 - d) Membuat laporan keadaan barang perlengkapan dinas
 - e) Mengatur dan meneliti permintaan barang dan perlengkapan
 - f) Melaksanakan pengarsipan berkas-berkas kedinasan
- 5) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Melaksanakan pengendalian daftar hadir kepegawaian
 - b) Menyusun daftar hadir urut kepangkatan
 - c) Menyusun daftar kebutuhan pegawai
 - d) Membuat laporan kinerja dan daftar hadir pegawai
 - e) Merencanakan peningkatan pendidikan pegawai
- 6) Bidang Perencanaan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a) Menghimpun meneliti rencana kerja tiap-tiap bidang untuk dijadikan program kerja
 - b) Mengatur dan mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan, perencanaan program, penyusunan laporan dan akuntabilitas, evaluasi dan pengelolaan data.
 - c) Membantu mengawasi dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan program, penyusunan laporan dan akuntabilitas, evaluasi dan pengelolaan data.
 - d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang perencanaan pada atasan.

- 7) Seksi penyusunan perencanaan program mempunyai tugas :
 - a) Membantu perencanaan berdasarkan program dari bidang, sekretariat dan UPTD
 - b) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran
 - c) Melaksanakan koordinasi kepada instansi yang berhubungan dengan perencanaan.
 - d) Menyusun penetapan rencana yang setrategis
- 8) Seksi penyusunan Laporan akuntabilitas mempunyai tugas :
 - a) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah
 - b) Menyusun bahan-bahan laporan akuntabilitas
 - c) Menyusun penetapan kinerja dan membuat laporan kinerja
- 9) Seksi Evaluasi dan Pengelolaan Data mempunyai tugas :
 - a) Menyiapkan bahan evaluasi dari bidang sekretariat
 - b) Menyusun pendataan selang pandang
 - c) Menghimpun data dan bahan untuk rapat
 - d) Menghimpun dan mengelola data objek potensi
 - e) Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas
- 10) Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas :
 - a) Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang lalu lintas yang meliputi pengendalian operasional, mengenai rekayasa lalu lintas serta pembinaan keselamatan ketertiban lalu lintas.

- b) Memfasilitaskan dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang mempunyai urusan dengan bidang lalu lintas.
- c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang lalu lintas pada atasan.

11) Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas :

- a) Membuat rencana kegiatan operasional pengawasan lalu lintas
- b) Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas.
- c) Melaksanakan tindakan korektif terhadap kebijakan lalu lintas
- d) Melaksanakan pengaturan lalu lintas, pengawalan pejabat, tokoh masyarakat dan masyarakat umum

12) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas:

- a) Membuat rencana pengaturan lalu lintas secara normatif
- b) Memelihara dan merawat rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat serta alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan.
- c) Memfasilitasi izin insidentif untuk pengangkutan alat-alat berat.



13) Seksi Bimbingan dan Keselamatan mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban masyarakat terhadap kebijakan lalu lintas.
- b) Memfasilitaskan usulan masyarakat yang akan menggunakan badan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas
- c) Merekomendasikan usulan masyarakat atau pihak swasta yang akan membuat alat pembatas kecepatan di jalan umum

14) Bidang Angkutan mempunyai tugas :

- a) Membuat dan merencanakan rencana kerja bidang angkutan yang meliputi pembinaan angkutan orang, pembinaan angkutan barang, dan pembinaan perparkiran.
- b) Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan pembinaan angkutan barang dan pembinaan perparkiran.
- c) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pembinaan angkutan orang, angkutan barang dan pembinaan perparkiran.
- d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang angkutan pada atasan.

15) Seksi angkutan Orang mempunyai tugas :

- a) Merencanakan kebutuhan jumlah angkutan orang berdasarkan perhitungan penumpang

- b) Mengatur trayek kendaraan dalam kota Palembang
- c) Mempersiapkan bahan dan menghitung tarif angkutan
- d) Melaksanakan evaluasi izin trayek

16) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas :

- a) Merekomendasikan pemberian izin angkutan barang
- b) Memfasilitasi izin bongkar muat barang
- c) Memfasilitasi perizinan insidentil kendaraan bus yang menyimpang dari trayek
- d) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi izin angkutan barang

17) Seksi perparkiran mempunyai tugas :

- a) Membuat perencanaan penetapan penunjukkan lokasi-lokasi perparkiran
- b) Melakukan pembinaan terhadap petugas pelaksanaan parkir
- c) Membuat rencana penataan dan pembinaan kendaraan tidak bermotor
- d) Mengevaluasi dan mengusulkan tarif perparkiran

18) Bidang Teknik Sarana dan Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) Membuat dan mengusulkan rencana kerja bidang teknik sarana dan fasilitas perhubungan yang meliputi perlengkapan jalan dan jembatan, pembinaan fasilitas perhubungan dan pembinaan pembengkelan dan karoseri

- b) Membantu dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan pembinaan fasilitas perhubungan perlengkapan jalan dan jembatan serta pembinaan perbengkelan dan karoseri
- c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang teknik sarana dan fasilitas perhubungan.

19) Seksi Perlengkapan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a) Mendata, menata, dan mengusulkan pembuatan papan nama jalan
- b) Mengopname papan nama jalan dan papan petunjuk arah yang tidak standar.
- c) Mengkaji dan merekomendasikan pemasangan lampu penerangan jalan.

20) Seksi Pembinaan Fasilitas Perhubungan mempunyai tugas :

- a) Menata dan mengawasi pemanfaatan trotoar
- b) Merekomendasikan pendirian perangkat telekomunikasi dan pembinaan konter ponsel
- c) Merekomendasikan pendirian jasa pengiriman barang

21) Seksi Pembinaan dan Karoseri mempunyai tugas :

- a) Membina dan mengawasi bengkel karoseri kendaraan bermotor
- b) Memfasilitasi dan membina sekolah pengemudi
- c) Memantau dan mengawasi dampak lingkungan bengkel kendaraan bermotor

- d) Memberikan rekomendasi sefisikasi teknik pembuatan karoseri

22) Bidang Pelayanan komunikasi mempunyai tugas :

- a) Membantu dan mengusulkan rencan kerja bidang pelayanan komunikasi yang meliputi, pembinaan kelompok informasi sosial pelayanan komunikasi mobile serta ceramah dialog
- b) Memfasilitasi dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan bidang tugas pelayanan komunikasi
- c) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang pelayanan komunikasi kepada atasan.

23) Seksi Pembinaan Kelompok Informasi Sosial mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) Mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok informasi
- b) Membina kelompok informasi sosial agar berperan dalam penyebaran informasi pemerintah dan pembangunan
- c) Mengevaluasi dan melibatkan kelompok informasi sosial andalan ke Provinsi dan ketingkat nasional
- d) Memperdayakan kelompok informasi sosial menangkal informasi negatif dan isu-isu yang tidak benar.

24) Seksi pelayanan Informasi Mobile mempunyai tugas :

- a) Melaksanakan kegiatan pertunjukan film

- b) Membuat (memproduksi) bahan materi siaran
- c) Melaksanakan siaran umum dan siaran khusus
- d) Melaksanakan pelayanan sound sistem

25) Seksi ceramah dan Dialog mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan (materi) ceramah dialog
- b) Melaksanakan ceramah dialog dengan masyarakat umum
- c) Melaksanakan ceramah dialog pada tokoh masyarakat

26) Bidang Media Informasi mempunyai tugas :

- a) Membuat dan mengusulkan rencana kegiatan yang meliputi pembinaan media cetak, pembinaan media radio, TV dan pengendalian informasi dan pameran
- b) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dari pembinaan media cetak, pembinaan media radio, TV dan film pengendalian informasi dan pameran
- c) Memfasilitasi, melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan bidang media informasi
- d) Melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bidang media informasi kepada atasan.

27) Seksi Media Cetak mempunyai tugas :

- a) Mendorong dan memfasilitasi pendirian media cetak dan penerbitan
- b) Membina dan mengawasi muatan (isi) media cetak dan penerbitan

- c) Memperdayakan kelompok-kelompok media cetak/penerbitan untuk menyebarkan informasi pemerintah dan pembangunan.

28) Seksi Media TV dan Radio Film mempunyai tugas :

- a) Mendorong dan memfasilitasi pendirian stasiun TV
- b) Mengawasi dan menerbitkan peredaran kaset CD, radio dan film
- c) Menata, membina dan mengawasi penggunaan frekuensi amatir radio.

29) Seksi Pengendalian Informasi dan Pameran mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan bahan pengendalian informasi dan pameran
- b) Menginventarisir bahan pameran dari pemerintah
- c) Menyiapkan rencana pameran tingkat kabupaten, pameran keliling dan pameran pembangunan.

30) UPTD Balai pengujian Bermotor mempunyai tugas :

- a) Mengkoordinasi tugas-tugas administrasi dan teknis pada balai pengujian kendaraan bermotor
- b) Mengawasi dan melaksanakan pengoperasian peralatan mekanis balai pengujian kendaraan bermotor.
- c) Memfasilitasi pejabat fungsional di UPTD PKB untuk mengetahui pengetahuan tentang kemajuan/perubahan teknologi otomatis.

31) Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a) Merencanakan dan melaksanakan secara umum ketatausahaan, kepegawaian, administrasi, dan fasilitas balai penhujian kendaraan bermotor
- b) Membantu pembukuan, tata kendataan, jumlah kendaraan yang akan diuji dan hasil rupa uji secara harian, bulanan, dan tahunan
- c) Merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pengoperasian mekanik uji kendaraan
- d) Menghitung daya angkut yang di tuju pertama kali
- e) Melaksanakan pemeriksaan fisik dan menilai kelayakan kendaraan bermotor yang dianjurkan untuk dilelang atau dijual oleh instansi pemerintah atau swasta.
- f) Melaksanakan pemeriksaan kelalaian jalan kendaraan bermotor di jalan, terminal, dan di tempat-tempat lain yang ditunjuk secara koordinasi.
- g) Melaksanakan uji petik kelayakan jalan kendaraan bermotor di daerah yang jauh dari balai pengujian kendaraan bermotor secara berkala (tourni)
- h) Merekomendasi tentang alat-alat tambahan perubahan modifikasi pada kendaraan bermotor wajib uji agar tetap layak jalan.

32) UPTD Terminal mempunyai tugas :

- a) Membantu dan mengujikan rencana kegiatan UPTD terminal yang meliputi urusan umum pengawasan operasional.
- b) Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan urusan umum dan pengawasan operasional.
- c) Memfasilitasi dan melayani pihak-pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan tugas-tugas UPTD terminal.
- d) Membantu laporan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan dan akhir tahun.

33) Sub bagian Tata Usaha

- a) Merencanakan, melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian, administrasi kepegawaian, dan fasilitas terminal.
- b) Membuat data tentang kegiatan terminal yang meliputi laporan kegiatan terminal.
- c) Membuat laporan bulanan arus penumpang keluar masuk terminal dan jumlah pelanggaran lalu lintas di terminal.
- d) Membuat laporan tingkat kedisiplinan petugas terminal
- e) Memelihara fasilitas utama dan penunjang terminal.
- f) Memberikan informasi terhadap calon penumpang tentang jurusan dan tarif angkutan.

- g) Melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pengusaha dan pengemudi di lingkungan terminal.

5. Data yang digunakan

- a. Penentuan target yang belum realistis

Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam menentukan target anggaran izin trayek belum realistis. Hal ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara langsung dengan staf bagian pengelolaan kendaran yang di jelaskan, bahwa target retribusi izin trayek adalah dengan cara melakukan perhitungan secara sekilas atau uji petik, yaitu dengan melihat banyaknya kendaraan yang ada pada saat perhitungan selama setahun, kemudian menyimpulkan hasil yang diperoleh. Hasil perhitungan tersebut diputuskan pemerintah Kota Palembang untuk tetap digunakan selama 4 tahun ke depan dan disepakati untuk tidak melakukan perubahan target retribusi izin trayek sebelum target yang ada dicapai.

- b. Tingkat efektivitas pemberlakuan sanksi

Menurut peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2004 tentang Retribusi izin trayek Kota Palembang pasal 27 dinyatakan bahwa “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STKD dan pada pasal 20 yang menyatakan bahwa “wajib retribusi

yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda uang paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhitung”.

Meskipun peraturan daerah mengenai sanksi dan ketentuan pidana telah ditetapkan, akan tetapi pelaksanaan sanksi dan ketentuan pidana masih kurang tegas dilakukan oleh petugas pemungutan retribusi di lapangan. Petugas pemungutan membiarkan (wajib retribusi) hanya membayar setengah dari tarif retribusi bahkan tidak membayar retribusi sekalipun.

c. Sistem pengendalian dan pengawasan di Lapangan

Dalam penagihan retribusi yang dilakukan petugas pemungut retribusi selalu mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan, karena pada saat pemungutan retribusi wajib retribusi tidak membayar tarif yang telah ditentukan akan tetapi kegiatan operasional kendaraan terus berlangsung tanpa membayar kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan petugas yang bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemungutan retribusi tidak ada. Hal inilah yang membuka kesempatan bagi petugas untuk melakukan kecurangan. Ini membuktikan masih kurangnya sistem pengendalian dan pengawasan para petugas Dinas perhubungan khususnya dibidang trayek.



d. Sarana dan Prasarana untuk operasional di lapangan

Sarana dan prasarana dalam pemungutan retribusi belum efektif dilakukan oleh petugas dishub. Hal ini di sebabkan karena belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada, seperti sumber daya yang potensial dan belum adanya dana untuk membuat bangunan UPTD dalam melakukan aktivitasnya.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi izin trayek menurun pada Dinas Perhubungan Kota Palembang antara lain :

- a. Penentuan target yang belum realistis

Tabel IV.1
Data Penerimaan Retribusi Izin Trayek
Dinas Perhubungan Kota Palembang
Tahun 2006-2010

Tahun Anggaran	Target	Persentase realisasi penerimaan Retribusi Izin Trayek
2006	1.000.000.000	83,33%
2007	1.200.000.000	55,12%
2008	2.177.125.000	79,17%
2009	2.750.000.000	95,24%
2010	2.887.500.000	

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2011

Tabel IV.1 di atas menunjukkan bahwa salah satu penyebab rendahnya persentase penerimaan retribusi izin trayek terhadap

retribusi daerah adalah tingkat target anggaran penerimaan retribusi izin trayek tidak seimbang atau mengalami fluktuasi dengan target yang telah dianggarkan. Dimana pada tahun 2006-2007 persentase kenaikan target mencapai 83,33%, pada tahun 2007-2008 persentase target izin trayek mengalami penurunan mencapai 55,12% pada tahun 2008-2009 persentase target izin trayek meningkat menjadi 79,17% dan pada tahun 2009-2010 persentase target izin trayek meningkat drastis mencapai 85,33% .

Data penerimaan retribusi izin trayek Kota Palembang tergambar pada tabel IV.1 di situ terlihat bahwa penerimaan retribusi izin trayek mengalami fluktuasi dengan target yang telah dianggarkan. Cara penyusunannya bersifat historis yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah atau item-item target yang sudah ada sebelumnya dengan alasan untuk menyesuaikan besarnya target ditetapkan tidak saja bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan namun juga dapat mengakibatkan kesalahan yang berkelanjutan.

Masalah utama anggaran yang terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep *value for money*, konsep ini sering kali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional yang tidak memperhatikan banyaknya sumber daya yang dimiliki, sehingga pada akhir tahun sering terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan kepada

aktivitas yang sebenarnya kurang penting/tepat untuk dilaksanakan.

Penentuan target retribusi pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan kepentingan nasional dan dengan memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Dinas komunikasi dan informatika menetapkan target retribusi izin trayek dengan melakukan perhitungan secara sekilas atau uji petik, yaitu dengan cara melihat banyaknya kendaraan, kemudian menyimpulkan hasil yang diperoleh. Tentunya perhitungan seperti ini kurang efektif dilakukan, dikarenakan setiap bulannya jumlah kendaraan (wajib retribusi) selalu mengalami fluktuatif atau perubahan. Hasil yang diperhitungkan tersebut di putuskan oleh pemerintah Kota Palembang untuk tetap digunakan selama 4 tahun kedepan dan disepakati bahwa untuk tidak melakukan perubahan target yang akan dicapai.

Selain itu, penyetoran terhadap penerimaan retribusi izin trayek sering kali adanya penundaan dan bahkan sering digunakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika untuk keperluan dinas yang bersifat umum (tidak berhubungan dengan kegiatan dinas perhubungan), sebelum penerimaan tersebut di

laopirkan kedinas Pendapatan Daerah. Ternyata hal ini menyebabkan jumlah penerimaan retribusi berkurang.

Menurut penulis, pemerintah Kota Palembang seharusnya dalam penentuan target harus melihat jumlah potensi kendaraan umum yang ada setiap tahunnya dan bagi dinas Perhubungan komunikasi dan informatika seharusnya tidak menggunakan dana penerimaan retribusi untuk keperluan dinas yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan izin trayek serta harus lebih memaksimalkan pendapatan terhadap wajib retribusi izin trayek.

b. Tingkat Efektivitas Pemberlakuan Sanksi

Pemberlakuan sanksi yang mengatur tentang retribusi izin trayek sangat perlu diperhatikan, sebab berfungsi untuk memperhatikan dasar hukum yang mengikat sehingga para wajib retribusi khususnya pemilik kendaraan taat dalam hal melakukan kewajiban dalam pembayaran retribusi.

Seperti yang tercantum diperaturan daerah nomor 23 Tahun 2004 tentang retribusi izin trayek kota Palembang yang terdapat pada pasal 27 yang menyatakan bahwa “Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan” dan retribusi yang terhutang atau kurang dibayar yang ditagih dengan menggunakan STRD sedangkan pada pasal 29 yang menyatakan bahwa “wajib retribusi yang tidak melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan ketentuan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan denda uang paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar". Tiap UPTD di Kota Palembang juga berhak memberi sanksi berupa peringatan atau teguran secara lisan maupun tulisan kepada wajib retribusi.

Meskipun peraturan daerah mengenai sanksi dan ketentuan pidana telah ditetapkan, akan tetapi permasalahan yang sering muncul adalah pelaksanaan sanksi dan ketentuan pidana yang diberikan kepada wajib retribusi masih kurang tegas dilakukan oleh para petugas pemungut retribusi dilapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Kota Palembang yang merupakan salah satu UPTD bagian dinas Perhubungan komunikasi dan informatika, diketahui bahwa setiap petugas yang melakukan penagihan retribusi kepada para wajib retribusi selalu menemukan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran seperti mencari jalan pintas untuk menghindari tarif retribusi dan jika harus diberlakukan sanksi maka jumlah wajib retribusi akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah itu sendiri.

Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam melakukan kegiatan razia sering bekerjasama dengan pihak kepolisian, tetapi

masih juga sering terjadi kecurangan/kebocoran antara petugas dengan pengemudi.

Menurut peneliti, untuk dapat meningkatkan pengenaan sanksi maka dinas Perhubungan komunikasi dan informatika harus meningkatkan penyuluhan kepada para wajib retribusi, baik secara langsung maupun melalui himbuan secara tertulis yang dapat menumbuhkan kepada para wajib retribusi dalam membayar retribusi dan lebih memperkuat proses pemungutan retribusi dan kerjasama dengan pihak kepolisian lebih di pertegas.

c. Sistem Pengendalian dan Pengawasan di Lapangan kurang tegas

Dalam sistem pengendalian dan pengawasan di beberapa instansi pemerintah yang memungut retribusi sering terjadi kebocoran dan kelolosan. Kebocoran dan kelolosan ini berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pegawai pemerintah demi kepentingan pribadi mereka. Hal ini menunjukkan kelemahan dari sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan. Untuk menghindari tingkat kebocoran dan kelolosan ini pemerintah Kota Palembang bekerja sama dengan pihak terkait (penyidik) yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi tindakan tersebut.

Selain itu meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan retribusi izin trayek sebaiknya dilakukan :

1) Melakukan Pendataan

Dinas perhubungan komunikasi dan informatika harus melakukan pendataan terhadap semua wajib retribusi izin trayek tiap bulan atau tiap tahunnya karena disamping dapat memudahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melakukan penagihan juga bisa bekerja sama dengan pihak samsat dan dinas pendapatan daerah dalam melakukan pendataan dan penarikan retribusi.

2) Melakukan Pembinaan

Dinas Perhubungan dalam meningkatkan penerimaan retribusi selalu melakukan pendataan. Untuk itulah perlu dilakukan pembinaan kepada petugas dan wajib retribusi agar dapat meningkatkan kesadaran wajib retribusi dalam menggunakan jasa yang telah diberikan oleh Dinas Perhubungan.

Pembinaan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas pada seluruh karyawan yang bergerak dilapangan dan yang terkait khususnya yang mengenai izin trzyek, oleh karena itu baik dan buruknya kinerja suatu karyawan tergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu karyawan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang itu sendiri.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang mengenai program kegiatan pembinaan adalah kurangnya pembinaan pada seluruh staf karyawan, dimana program pelatihan dilakukan oleh Dinas Perhubungan hanya dilakukan setahun sekali, itupun hanya dilakukan bagi karyawan yang telah memiliki jabatan yang penting saja atau berprestasi saja. Khususnya pada bagian teknis atau setrategi saja, sedangkan bagi setaf lainnya jarang sekali diterapkan.

Akibat yang timbul dari permasalahan diatas adalah kurangnya pembinaan pada semua staf yang ada, khususnya setrategis khususnya pada bagian yang diluar bagian staf strategis yang ada di Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Solusi terbaik yang semestinya dilakukan Dinas Perhubungan kota Palembang adalah melatih seluruh setaf karyawan pada semua bidang (tanpa terkecuali), agar skill dan kualitas dari karyawan pada dinas Dinas Perhubungan Kota Palembang benar-benar bermutu.

- d. Sarana dan prasarana untuk operasional di lapangan (kondisi objek penerimaan retribusi atau pajak)

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam mewujudkan Palembang Kota Internasional dengan menggunakan transportasi yang lebih baik dan efektif. Pemerintah Kota Palembang dalam operasional

dilapangan akan lebih ditingkatkan agar menjadi Kota yang aman, damai, dan terwujud menjadi Kota Internasional.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah

Guna meningkatkan retribusi izin trayek upaya yang dilakukan Dinas perhubungan Kota Palembang adalah :

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan

Dalam setiap instansi membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, kurangnya kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah berakibat penerimaan yang tidak optimal. Di lihat dari segi pendidikan masih banyak pegawai Dinas Perhubungan Kota Palembang yang lulusan sekolah menengah atas (SMA), sehingga tidak menjalankan tugasnya dengan benar karena mereka belum mengetahui dan mengerti pekerjaannya dan juga pengalaman yang belum luas tentang retribusi. Dengan adanya sumber daya manusia yang kurang memadai dan berkualitas tersebut dapat mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi.

Dalam hal ini perlu dilakukan pelatihan-pelatihan seperti peningkatan basis formal dan pendidikan informal dan memberikan pengenalan alat-alat teknologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar peningkatan aparat retribusi sehingga dapat

meningkatkan penerimaan retribusi yang di targetkan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang.

b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan

Pengkoordinasian antar karyawan dan instansi sangat penting yang harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang telah melakukan pembagian tugas untuk melakukan pengawasan terhadap para wajib retribusi, salah satunya adalah melakukan sampling terhadap objek retribusi tertentu, yaitu dengan mengumpulkan sampel jumlah kendaraan yang ada di kota Palembang yang dikenakan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan pihak dinas perhubungan untuk meningkatkan retribusi daerah tersebut tentunya juga harus didukung dengan adanya kerjasama yang baik antara karyawan dengan karyawan Dinas Perhubungan Kota Palembang harus ditingkatkan dalam kerjasama dilapangan pada saat pemungutan retribusi sehingga tidak terjadi kecurangan. Agar dapat terciptanya keinginan untuk dapat meningkatkan retribusi daerah guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Palembang.

Untuk itu pihak Dinas Perhubungan juga harus dapat meningkatkan pengkoordinasian antara Pihak instansi dengan instansi lainnya, yaitu pihak instansi pemerintah Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian dalam melakukan kerjasama



razia kendaraan untuk dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

c. Kualitas pelayanan harus diperbaiki

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pihak Dinas perhubungan harus selalu mengevaluasi sistem pelayanan pemungutan yang ada, jangan sampai orang malas membayar karena kesulitan di dalam pembayaran retribusi izin trayek. Dan Dinas perhubungan senantiasa meningkatkan sistem pelayanan terhadap retribusi, seperti waktu proses keluarnya izin trayek tidak memakan waktu yang lama dan adanya petugas khusus yang meningkatkan wajib retribusi yang akan segera jatuh tempo, bisa melalui via sms, atau memberikan surat kepada wajib retribusi untuk meningkatkan bahwa retribusi izin trayek akan segera jatuh tempo.

d. Pendekatan objek dan sumber pajak atau retribusi

Dinas perhubungan seharusnya sering melakukan pertemuan dengan para wajib retribusi setidaknya dilakukan 1 tahun sekali, bisa dilaksanakan pada saat hari ulang tahun dinas perhubungan atau pada hari kemerdekaan Negara. Dengan seringnya dilakukan pertemuan tersebut dapat mendekatkan hubungan antara dinas perhubungan sebagai pemungut retribusi dan wajib retribusi sebagai pembayar.

Adapun hal yang harus dilakukan oleh dinas perhubungan yaitu dengan meningkatkan pemberian penyuluhan kepada masyarakat melalui media cetak ataupun media elektronik. Selain upaya sosialisasi tersebut pihak dinas perhubungan seharusnya juga dapat melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi secara langsung, upaya ini dimaksud agar dapat lebih mendekatkan dan lebih menyentuh kepada wajib retribusi. Dengan sosialisasi seperti ini tentunya wajib retribusi dapat lebih paham akan pentingnya membayar retribusi dan sehingga wajib retribusi lebih termotivasi untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan oleh pihak Pemerintah.

- e. Pembuatan peraturan-peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan

Kesadaran masyarakat merupakan hal terpenting dalam melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika keseluruhan masyarakatnya baik tentunya penerimaan retribusi daerahpun akan berjalan dengan baik. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan keadaan perkembangan perekonomian di tepi daerah. Untuk itu dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi daerah dinas perhubungan harus melakukan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang akan dilakukan oleh pihak pemerintah kepada wajib retribusi.

Dinas Perhubungan senantiasa memperhatikan kondisi peraturan mengenai pemungutan retribusi izin trayek, jika peraturan yang berlaku sudah tidak bisa lagi atau tidak cocok dengan kondisi maka peraturan tersebut harus dievaluasi sesuai dengan kondisi perkembangan ekonomi, jumlah kendaraan, bentuk kendaraan, bentuk usaha dan lain-lain.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Baerdasarkan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun

Penerimaan Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- a.) Penentuan target belum realistis
- b.) Tingkat efektivitas pemberlakuan sanksi
- c.) Sistem pengendalian dan pengawasan di lapangan kurang tegas
- d.) Sarana dan prasarana untuk operasional lapangan (kondisi objek penerimaan Retribusi).

Dalam pengendalian dan pengawasan pihak Dinas Perhubungan sering terjadi kebocoran dan kelolosan yang merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah Dinas Perhubungan dalam menarik retribusi. Hal ini menunjukkan kelemahan pengendalian dan pengawasan di lapangan kurang tegas, dan pihak Dinas Perhubungan kurang dalam mengontrol petugas dilapangan.

2. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan Retribusi Izin Trayek

Untuk mengetahui penerimaan Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan Kota Palembang, maka yang akan dilakukan adalah :

- a.) Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
- b.) Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dikembangkan
- c.) Kualitas pelayanan harus diperbaiki
- d.) Pendekatan objek dan subjek pajak atau retribusi
- e.) Pembuatan peraturan daerah yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan.

Dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, pihak Dinas Perhubungan Kota Palembang dalam meningkatkan SDM dengan cara melakukan pelatihan- pelatihan seperti melakukan basis formal dan pendidikan informal dan memberikan pengenalan alat teknologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat meningkatkan penerimaan retribusi.



B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Palembang menurun

Dinas Perhubungan komunikasi dan informatika perlu bekerjasama dengan pihak instansi lain atau pihak kepolisian dalam melakukan razia, dimana dalam kerjasama ini di harapkan agar tidak terjadi kebocoran dan kelolosan dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek. Pengawasan dan pengendalia yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Palembang harus di pertegas dan di perketat dalam melakukan tugasnya, sehingga bisa meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah

Diharapkan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan. Dengan cara karyawan yang pendidikannya kurang maka diikut sertakan dalam mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada agar lebih berkualitas sehingga dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Dan dengan adanya sumber-sumber potensi baru maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Untuk itu, Dinas perhubungan harus melakukan penelitian secara langsung dalam

membuat lahan-lahan baru yang dapat dijadikan sebagai tambahan penerimaan retribusi izin trayek agar dapat meningkatkan pendapatan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Harist. 2000. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**. Erlangga. Jakarta.
- Indra Bastian dan Gatot Supriyanto. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**. Salemba Empat. Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia. 2002. Penerbit M2S. Bandung.
- Kunarjo. 2004. **Akuntansi Sektor Publik**. Erlangga. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**. Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. **Akuntansi Sektor Publik**. Andi. Yogyakarta.
- Nur Indiantoro dan Bambang Supomo. 2002. **Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen**. BPFE. Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 15 Tahun 2001. **Tentang Retribusi Izin Trayek**.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001. **Tentang Retribusi Daerah**.
- Riduwan. 2003. **Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian**. Alfabeta. Bandung.
- Siahaan, Marithot P. 2005. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta
- Sugiyono. 2004. **Metode Penelitian Bisnis**. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. **Tentang Pajak dan Retribusi Daerah**.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN

JURUSAN MANAJEMEN (SI)
 JURUSAN AKUNTANSI (SI)
 MANAJEMEN PENYASARAN (SI)

IZIN PENYELENGGARAAN

No. 0619/DITK/IB/01
 No. 0620/DITK/IB/01
 No. 0621/DITK/IB/01

AKREDITASI

No. 01/P/BAK/PT/01/K/01/01/01/01 (B)
 No. 01/P/BAK/PT/01/K/01/01/01/01 (B)
 No. 01/P/BAK/PT/01/K/01/01/01/01 (B)

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Lha (U/11) 511433 Faximile (0711) 5114333 Palembang, 30132

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari/Tanggal Ujian : Sabtu, 10 Maret 2012
 Waktu Ujian : 10.00 – 12.00 WIB
 Nama Mahasiswa : Nur Handayani
 NIM : 22 2008 053
 Program Studi : Akuntansi
 Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
 Judul Skripsi : Analisis Faktor-faktor Penyebab Turunnya Retribusi Izin Trayek dan Upaya-upaya Untuk Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kota Palembang

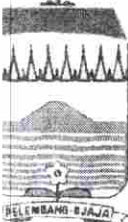
TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI SERTA PEMBIMBING SKRIPSI SEHINGGA DIPERKENANKAN UNTUK MENDAFTAR WISUDA

NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Pembimbing	26-03-2012	
Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Ketua Penguji	26 03 2012	
Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Anggota Penguji 1	26/3-2012	
Muhammad Fahmi, S.E., M.Si.,	Anggota Penguji 2	26/3 2012	

Palembang, 26 Maret 2012
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Drs. Sunardi, S.E., M.Si.
 NIDN : 0206046303



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Pangeran Sido Ing Lautan 35 Ilir Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

Telepon : (0711) 441175 Faksimile : (0711) 442547 Kode Pos 30146

E-mail : dishub_palembang@yahoo.co.id, Website : www.dishub.palembang.go.id

Palembang, 22 November 2011

nomor : 551/1034.b/DISHUB/2011
ifat : Biasa
ampiran :
al : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala BKBPPM Kota Plg
di -
Palembang

Sehubungan dengan surat Kepala BKBPPM Kota Palembang Nomor : 070/1039/BAN.KBPM/2011 tanggal 16 November 2011 perihal Permohonan Izin Pengambilan Data dengan ini dilaporkan bahwa :

Nama : NUR HANDAYANI
Nim : 22 2008 053
Mata Kuliah : Akuntansi Sektor Publik

Diperkenankan untuk melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PALEMBANG

H. REMBIA RIEN HM. TOYIB, SE, M.Si
Rembia Utama Muda
NIP. 19590213 198003 1 002



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

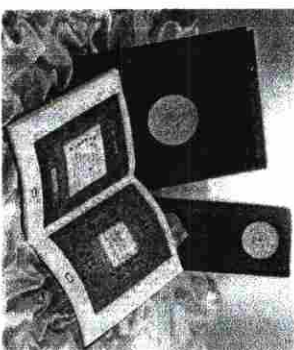


688/J-10/FE-UMP/SHAW/2011

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NUR HANDAYANI
NIMI : 222008053
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat SANGAT MEMUASKAN

Palembang, 21 Mei 2011

an. Dekan

Berbantu Dekan IV

Unggul dan Islami



Drs. Antoni



ECONOMICS FACULTY
UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LANGUAGE INSTITUTE & CAREER

Jl. Ahmad Yani - 14 Ulu Palembang
 Telp. 0711.511433
 e-mail: lbpk_feump@yahoo.com

TOEFL PREDICTION TEST

FULL NAME	TIME TAKEN
NUR HANDAYANI	08.00-10.00 AM

SEX	DATE OF BIRTH	TEST DATE
M/F	D / M / Y	D / M / Y
F	12-Nov-1988	29-Jan-2012

TOEFL PREDICTION SCORES

SECTION 1	SECTION 2	SECTION 3	TOTAL SCORE
47	39	43	430

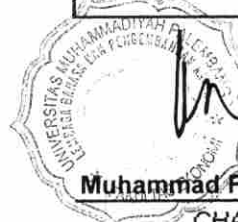
EXAMINEE'S NUMBER

1246

Prof. Dr. Indawan Syahri, M.Pd.

Consultant

DATE OF REPORT
07/02/2012



Muhammad Fahmi., S.E., M.Si

CHAIRMAN

When properly signed, this report certifies that the candidate whose name appears above has taken the TOEFL prediction Test of Economics faculty - language institute & career under secure conditions. This score is valid for only six months. This report is confidential

BIODATA

NAMA : NUR HANDAYANI
NIM : 22 2008 053
Tempat/Tgl Lahir : Pekalongan, 12 November 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Betung-Sekayu No.070 Lik.III Betung RT.020 RW.006
Hp/tp : 085377275280

Nama Orang Tua

1. Ayah : H. Slamet Yahya
2. Ibu : Hj. Aliyah

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga